



RINGKASAN PEMERINTAH

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 merupakan salah satu media pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2014 yang telah berjalan sampai dengan tahun keempat di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 21 sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2014, disimpulkan bahwa :

1. Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat, Toleransi, dan Peran Kelembagaan, capaian kinerjanya mencapai 100% atau dapat dikatakan Indikator telah bernilai baik.
2. Sasaran 2 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kebudayaan Daerah, capaian kinerjanya mencapai 100% atau dapat dikatakan Indikator telah bernilai baik.
3. Sasaran 3 Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis, Kreatif dan Responsif terhadap Perubahan Sosial, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 3 mencapai 108,62 % dengan klasifikasi Sangat Baik.
4. Sasaran 4 Menjamin Pemerataan Pemenuhan Pendidikan Dasar, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat serta Menurunnya Buta Aksara, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 4 yaitu 87,95 persen dengan klasifikasi Baik.



5. Sasaran 5 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan yang Berdaya Saing Global, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 5 mencapai 108,45 % dengan klasifikasi Sangat Baik.
6. Sasaran 6 Terwujudnya Peningkatan Komponen Derajat Kesehatan Masyarakat, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 6 mencapai 64,28 % dengan klasifikasi cukup.
7. Sasaran 7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sehingga terciptanya Lapangan Kerja Baru, Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 7 mencapai 150,79 % dengan klasifikasi Sangat Baik.
8. Sasaran 8 Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Terampil, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 8 mencapai 143,99 % dengan klasifikasi Sangat Baik.
9. Sasaran 9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jaminan Berinvestasi, capaian kinerjanya mencapai 480,00 % atau dapat dikatakan pencapaian kinerja indikator dalam kategori sangat baik.
10. Sasaran 10 Terwujudnya optimalisasi Pengembangan pada Sektor Pariwisata, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 10 mencapai 88,46 % dengan klasifikasi Baik,
11. Sasaran 11 Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 11 mencapai 230,41 % dengan klasifikasi Sangat Baik
12. Sasaran 12 Terwujudnya Penataan Ruang yang Serasi, Seimbang dan Produktif, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 12 mencapai 186,51 % dengan klasifikasi Sangat Baik.
13. Sasaran 13 Terwujudnya Infrastruktur yang Memadai dan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat maupun Sektor Pembangunan, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 13 mencapai 231,55 % dengan klasifikasi Sangat Baik,
14. Sasaran 14 Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 14 mencapai 239,36 % dengan klasifikasi Sangat Baik.



15. Sasaran 15 Terwujudnya Sistem Transfortasi dan Komunikasi Terpadu dan Menyeluruh %, rata-rata capaian sasaran dari indikator ini sebesar 331,65 % dengan klasifikasi bernilai sangat baik.
16. Sasaran 16 Menjamin Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan serta IPTEK secara Partisipatif dan Berkelanjutan, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 16 mencapai 87,74 % dengan klasifikasi Baik.
17. Sasaran 17 Tersedianya Sistem Pengelolaan Lingkungan Capaian Kinerja, rata-rata capaian kinerja dari sasaran 17 mencapai 116,67 % dengan klasifikasi sangat baik.
18. Sasaran 18 Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu, rata-rata capaian kinerja sebesar 175,00 % dengan klasifikasi sangat baik.
19. Sasaran 19 Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan yang Baik dan Aparatur yang Bersih dan Profesional, rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00 % dengan klasifikasi baik.
20. Sasaran 20 Terwujudnya Pembangunan yang Bersifat Partisipatuf dan Berkeadilan, rata-rata capaian kinerja sebesar 198,57 % dengan klasifikasi sangat baik.
21. Sasaran 21 Terwujudnya Keseimbangan Gender dan Kesejahteraan semua Komponen, rat-rata capaian kinerja dari sasaran 21 mencapai 143,43 % dengan klasifikasi Sangat Baik.

Dari 21 sasaran yang ada, 14 (empat belas) sasaran tercapai dengan predikat Sangat Baik karena melebihi 100 %, 6 (enam) sasaran tercapai dengan predikat Baik yang mencapai 80,00 – 100,00 % dan 1 (satu) sasaran tercapai dengan predikat cukup baik yang mencapai 64,28 %.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, dapat kami laporkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2013 mencapai 97,35 % dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 994.497.708.684,61, untuk belanja daerah mencapai 92,06 % dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 949.075.622.289,62 sedangkan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2013 mencapai 102,52 %, dari target yang ditetapkan atau sebesar



Rp. 25.515.299.073,78 dan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 99,82 % dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 15.446.055.182,00

Dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu terkait dengan perumusan indikator kinerja daerah, maupun indikator kinerja utama pada tiap-tiap SKPD agar dapat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berdasarkan kondisi senyatanya yang dihadapi, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya, termasuk juga didalamnya terkait *penentuan besaran target kinerja* agar berdasarkan hasil analisis yang lebih mendalam sehingga pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Pengintegrasian standar pelayanan minimal kedalam RPJMD *sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang telah diatur oleh konstitusi* perlu dilakukan, disamping itu harmonisasi perencanaan dari hulu ke hilir (RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja SKPD) agar senantiasa dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.